## BAB IV

## ANALISIS PERAN BADAN PENASEHTAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KUA KECAMATAN CERME GRESIK DALAM MEMBIMBING PERNIKAHAN CALON MEMPELAI

Analisis peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
 (BP4) KUA Kecamatan Cerme Gresik dalam Membimbing Pernikahan
 Calon Mempelai

BP4 KUA Kecamatan Cerme Gresik merupakan pembantu dari Kementrian Agama yang ditempatkan pada tingkat pemerintah bawah yang diharapkan mampu membantu Kementrian Agama dalam tugasnya menciptakan keluarga sejahtera yang Islami, karena BP4 ditingkat kecamatan ini dirasa lebih memasyarakat, artinya lebih dekat dengan masyarakat tentunya lebih tahu situasi dan kondisi yang ada di masyarakat.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwasanya BP4 ini mempunyai banyak macam tugasnya yang masuk dalam progam kerja mereka yaitu memberikan peranan dan konstribusi yang baik di masyarakat guna terciptanya tujuan perkawinan.

Diantara progam kerja BP4 adalah berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam memberikan penyuluhannya diharapkan masyarakat dapat mengetahui manfaat adanya Undang-undang

tersebut dan mau untuk melaksanakanya. Mengupayakan agar tidak ada lagi ketidakpahaman masyarakat tentang peraturan perkawinan, misalnya melakukan pernikahan dibawah tangan atau melakukan pernikahan dibawah umur.

Salah satu dari tugasnya lagi yaitu untuk menunjang tujuan dari perkawinan ialah BP4 memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang hendak melakukan pernikahan. Pada waktu prosesi sebelum akad perkawinan itu dimanfaatkan untuk pembekalan dan pengetahuan bagi calon mempelai yang akan memasuki gerbang baru yaitu gerbang rumah tangga atau keluarga.

BP4 kecamatan Cerme Gresik ini berupaya memenuhi semua program kerja yang telah ditetapkan , salah satu yang disoroti oleh peneliti dalam skripsi ini adalah peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan(BP4) KUA kecamatan Cerme Gresik dalam membimbing calon mempelai.

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh, baik dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait, dengan melihat mekanisme pemberian bimbingan yang diadakan pada waktuprosesi sebelum akad perkawinan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA kecamatan Cerme Gresik "berjalan efektif" dalam membimbing calon mempelai yang dilaksanakan di aula kantor KUA setempat.

Hal ini berdasarkan opini masyarakat yang menghendaki prosedur yang praktis, karena ketika masyarakat pada waktu setelah mendaftar di KUA maka pihak KUA Kecamatan Cerme Gresik telah menjadwal waktu untuk membimbing calon mempelai yang dilaksanakan setiap hari selasa.

Akan tetapi, dari keterangan tersebut diatas, penulis juga berpendapat, bahwa BP4 KUA kecamatan Cerme Gresik ini sedang terus berupaya menggalakkan dan mencari jalan yang lebih efektif lagi berguna dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, agar masyarakat merasa perlu adanya organisasi lembaga semi resmi ini.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Kerja
 Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA
 Kecamatan Cerme Gresik Dalam Membimbing Pernikahan Calon Mempelai

Sebagai sebuah institusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa dapat dipastikan terdapat kekurangan dan kelebihan.Demikian pula dengan BP4 KUA Kecamatan Cerme Gresik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Gresik. Faktor-faktor pendukung dan penghambat program kerja dalam memberikan peran dan fungsi BP4 memberikan cerminan bahwa institusi ini berjalan diatas dinamika yang dimiliki. Dalam sebuah teknik memberikan bimbingan kepada calon mempelai, faktor-faktor pendukung maupun penghambat tentu memberikan dampak terhadap keberhasilan upaya-upaya yang dilakukan.Faktor-faktor yang muncul ke permukaan merupakan sarana untuk memahami dan menjelaskan efektifitas peran BP4 mampu dijalankan dengan baik atau tidak.<sup>1</sup>

Mengaca dari hasil penelitian yang telah lalu, maka BP4 KUA kecamatan Cerme sebenarnya memiliki faktor-faktor pendukung yang menunjang keberhasilannya dalam menjalankan perannya dalam memberikan bimbingan. *Pertama*, sebagai sebuah lembaga resmi, BP4 KUA kecamatan Cerme Gresik, bagaimanapun merupakan bagian internal dari Kementrian Agama. Kedudukannya sebagai perpanjangan pemerintah tidak membawa kesulitan bagi BP4 dalam memenuhi kebutuhan institusinya. Persoalan dana dan fasilitas paling tidak bukan hambatan karena seluruhnya ditanggung oleh pemerintah.

Sekalipun hanya mengandalkan dana dari pemerintah sesuai dengan pos anggaran yang dimiliki, BP4 masih dapat melakukan kinerjanya. Sementara itu, *kedua*, BP4 KUA kecamatan Cerme Gresik mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan.Berbagai elemen tersebut dapat disebutkan di sini seperti para ulama, LSM, bahkan otoritas Pengadilan Agama Kabupaten Gresik menyambut terbuka agar BP4 mampu melaksanakan fungsi dan perannya secara baik.<sup>2</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Djazuli Wangsa Saputra, et, al, *Perang BP4 dan Lembaga Konsultasi Perkawinan dan Keluarga*, (Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga), (Jakarta: BP4 Pusat, 1998). Edisi Januari No. 187, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, 4-5.

Andaikata tujuan BP4 KUA Cerme Gresik dapat tercapai sesungguhnya terdapat nilai positif dari pandangan masyarakat mengenai dirinya.Pandangan positif itu misalnya terkait bagaimana masyarakat dipandang mampu menjaga ikatan perkawinan mereka sehingga pelaksanaan terhadap hukum Islam dapat dinilai terlaksana. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai suami istri akan turut mendorong kestabilan masyarakat kecamatan Cerme Gresik pada umumnya. Karena itulah BP4 cukup memberikan arti, terutama bagi pasangan calon suami dan calon istri yang hendak menikah dihadapkan terlebih dahulu kepada mereka. Meskipun ini terkesan struktural, tetapi paling tidak terdapat efek psikologis atau pengetahuan akan nasehat-nasehat atau bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh BP4.

Misalnya dalam hal kesadaran tanggungjawab, sangat ditekankan bagaimana tanggungjawab suami menjadi sangat penting untuk menghidupi dan menjaga keluarganya dan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dan menjaga kehormatan keluarga dengan baik.Hal ini jelas disesuaikan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77, 78, 79 dan 80 yang menerangkan mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam menjalankan rumah tangganya.Karena bagaimanapun BP4 merupakan institusi perpanjangan tangan dari pemerintah, maka mereka juga terkena aturan-aturan struktural yang jelas tidak dapat diterobos melampaui kewenangan struktural. Namun dengan melihat realitas, kewenangan ini

dapat menjadi jalan kecil dalam memberikan kemanfaatan bagi masyarakat kecamatan Cerme Gresik.

Selain itu, kekuatan yang dimiliki oleh BP4 adalah karena saran-saran yang diutarakan berdimensi religius. Hal ini sangat menguntungkan karena mayoritas penduduk kecamatan Cerme Gresik, sebagaimana banyak daerah lain di pulau Jawa, adalah beragama Islam. Dorongan untuk mengamalkan ajaran agama Islam, atau dalam hal ini adalah hukum Islam, dapat lebih ditekankan sebagai bagian terpenting dalam proses pembinaan dan penasehatan perkawinan. Bagaimanapun dengan mengamalkan ajaran agama kehidupan keluarga lebih mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketenteraman, kedamaian dan keamanan yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama Islam.Karena pembentukan keluarga yang baik dapat dilakukan melalui ajaran agama.Di sini agama menjadi peran penting dalam pembentukan watak, karakter dan kepribadian seseorang.Dengan demikian baik buruknya seseorang tergantung kepada kebiasaan dan pendidikan yang diterima di rumah tangga.

Ajaran agama Islam merupakan *rahmatan lil alamin*. Apabila mengamalkan ajaran agama diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari akan terbinalah keamanan dan ketertiban. Karena setiap individu merasa tidak perlu mengganggu orang lain maka dampak yang dirasakan tidak hanya bagi keluarga tersebut akan tetapi akan berdampak bagi masyarakat sekitarnya merasakan setiap rumah tangga rukun dan damai. Keutuhan dan keharmonisan keluarga tidak bisa lepas dari faktor agama. Akan tetapi

kenyataan tidak banyak sebagian besar orang memandang peran agama sebagai faktor yang bersifat ilmiah, dan beranggapan, bahwa satu-satunya yang bersifat efektif dalam keharmonisan keluarga adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan. Tanpa memahami keimanan di dalam agama yang membangun moral dan kepekaan individu serta memperbaiki hubungan-hubungan sosial dan memperkuat tali kekeluargaan. Seperti teori Husain Ali yang berpendapat, bahwa agama menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Apabila seseorang beriman dengan dasar *Tauhid* (Keesaan Allah) dan *Ma'ad* (iman kepada Kebangkitan), kehidupan dan gerakangerakan akan dibalur oleh kesucian. Hidupnya akan memiliki tujuan yang baik dan cita-cita serta prilakunya kan selaras dengan ajaran-ajaran agama. Keinginan akan selaras dengan perintah agama yang menjamin kemakmuran dan kesejahteraan jiwa dan raga.<sup>3)</sup>

Meskipun berbagai faktor pendukung menstimulasi tugas-tugas BP4, tidak terelakkan bahwa BP4 KUA kecamatan Cerme Gresik mengalami hambatan-hambatan.Hambatan itu, *pertama*, karena belum optimalnya kinerja BP4.Dari pengamatan peneliti dan beberapa data yang diperoleh, peran BP4 kecamatan Cerme Gresik masih belum optimal karena kordinasi yang dilakukan dengan berbagai pihak masih sangat kurang.BP4 kecamatan Cerme Gresik masih mengandalkan kerjasama terbatas dengan beberapa institusi yang juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, seperti

<sup>3</sup>·Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992, 11.

Kantor Urusan Agama (KUA).Lembaga-lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, atau kelompok-kelompok kecil di desa-desa kurang begitu mendapatkan perhatian sehingga BP4 seolah-olah menjadi elitis.

Kedua, meskipun keberadaan BP4 telah lama di KUA kecamatan Cerme Gresik tetapi banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan institusi ini atau bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Keadaan ini terjadi karena buruknya sosialisasi yang dilakukan oleh BP4 kepada masyarakat. Anggapan lain mengenai BP4 oleh masyarakat karena institusi ini dinilai tidak capable dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak banyak masyarakat yang memanfaatkan.

Keadaan lain yang lebih memperburuk citra BP4 adalah anggapan birokratis dari masyarakat. Tentu ini dimaksudkan bahwa BP4 tidak banyak melakukan langkah-langkah revolutif atau mendekati masyarakat sehingga mereka dapat mengenal lebih baik institusi ini.Banyak di antara masyarakat yang lebih melihat bahwa urusan perkawinan, ketika hendak berniat cerai, maka solusinya adalah pengadilan. Kegagalan dalam membangun citra ini memang tidak dapat digeneralisir dalam satu aras. Tetapi selain pandangan nyinyir di atas karena memang BP4 dianggap akan mengganggu niatan suami istri yang memang bertekad untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Di sinilah peran dan fungsi BP4 dalam memberikan bimbingan merasa tidak dibutuhkan oleh masyarakat karena pada akhirnya akan tetap memilih jalan berpisah bagi kehidupan perkawinan.

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat yang telah diuraikan, kiranya peran BP4 memang masih dibutuhkan.Berbagai hambatan perlu dicarikan langkah solutif agar dapat mengoptimalkan kinerja lembaga semi resmi ini.Dalam program kerja yang tampak memang BP4 seharusnya membuka peluang bagi aktor-aktor lain untuk masuk di dalamnya, dalam hal ini adalah berbagai elemen masyarakat seperti ulama dan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Hal ini selain akan menunjang kinerja mereka, juga lebih mendekatkan BP4 dengan masyarakat. Keterlibatan elemen masyarakat dengan pola rekruitmen yang ketat akan dapat mengoptimalkan kinerja dalam penasehatan, pembinaan dan pelestarian pernikahan. Apalagi kesan-kesan birokratis, elitis, dan mahal kemungkinan besar akan dapat diminimalisir karena latar belakang mediator mereka berasal dari masyarakat.

Selain itu, BP4 perlu melebarkan kerjasama dengan berbagai instansi, baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang selama ini kurang begitu dikembangkan.Dalam hal seperti ini memang dibutuhkan gerak aktif BP4 sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, bukan hanya gerak pasif yang menunggu masyarakat untuk datang kepada BP4 ketika dihadapkan pada persoalan pernikahan. Dengan optimalisasi program kerja ini, maka peran BP4 akan dapat dilakukan secara optimal sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.